



Ma'had Aly sebagai Fenomena Nasional: Kaderisasi Ulama, Otoritas, dan Politik Prestise Pesantren

**Muhammad Yusuf Marjani¹, Amir Maliki Abitolkha²,
Arhan³, Mim Maulana Mubarok⁴**

^{1,2,3,4}*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya*

¹myusufmarjani@gmail.com, ²amir.abitolkha@gmail.com,
³aarhanbima@gmail.com, ⁴maulanamubarok255@gmail.com

ABSTRAK

Kemunculan dan pertumbuhan Ma'had Aly sebagai lembaga pendidikan tinggi berbasis pesantren menandai transformasi signifikan pendidikan Islam di Indonesia kontemporer. Artikel ini menganalisis Ma'had Aly sebagai fenomena nasional melalui lima dimensi: pertumbuhan institusional, kebijakan negara, pembentukan kader ulama, transformasi otoritas keagamaan, dan politik prestise pesantren. Dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka kualitatif yang dibingkai oleh sosiologi pengetahuan—teori otoritas Max Weber, modal simbolik Pierre Bourdieu, dan tradisi diskursif Talal Asad—data diambil dari peraturan pemerintah, statistik Kementerian Agama, dan literatur akademis. Temuan menunjukkan bahwa Ma'had Aly berkembang dari 27 lembaga pada tahun 2017 menjadi 91 lembaga pada Maret 2025. Selain berfungsi sebagai lembaga pembentukan kader ulama, Ma'had Aly beroperasi sebagai mekanisme untuk pelembagaan otoritas keagamaan dan reproduksi modal simbolik pesantren. Pendiriannya mencerminkan respons pesantren terhadap modernitas sekaligus menjadi arena kontestasi prestise dalam bidang sosial-keagamaan nasional. Kebaruan studi ini terletak pada sintesis Weber–Bourdieu–Asad untuk menjelaskan Ma'had Aly sebagai proyek kaderisasi dan arena perjuangan simbolik.

Kata kunci : Ma'had Aly, Otoritas Keagamaan, Modal Simbolik, Pesantren, Pendidikan Tinggi Islam

ABSTRACT

The emergence and growth of Ma'had Aly as a pesantren-based higher education institution mark a significant transformation of Islamic education in contemporary Indonesia. This article analyzes Ma'had Aly as a national phenomenon through five dimensions: institutional growth, state policy, ulama cadre formation, transformation of religious authority, and the politics of pesantren prestige. Employing a qualitative library research approach framed by the sociology of knowledge—Max Weber's theory of authority, Pierre Bourdieu's symbolic capital, and Talal Asad's discursive tradition—data were drawn from government regulations, Ministry of Religious Affairs statistics, and academic literature. The findings show that Ma'had Aly expanded from 27 institutions in 2017 to 91 institutions by March 2025. Beyond functioning as an institution for ulama cadre formation, Ma'had Aly operates as a mechanism for the institutionalization of religious authority and the reproduction of pesantren symbolic capital. Its establishment reflects pesantren responses to modernity while simultaneously becoming an arena of prestige contestation within the national socio-religious field. The novelty of this study lies in synthesizing Weber–Bourdieu–Asad to explain Ma'had Aly as both a cadreization project and an arena of symbolic struggle.

Keywords: *Ma'had Aly, Religious Authority, Symbolic Capital, Pesantren, Islamic Higher Education*

PENDAHULUAN

Transformasi pendidikan Islam di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir memperlihatkan dinamika institusional yang semakin kompleks, terutama dengan munculnya Ma'had Aly sebagai bentuk pendidikan tinggi berbasis pesantren. Kehadiran lembaga ini menandai fase baru dalam evolusi sistem pendidikan pesantren, di mana tradisi keilmuan klasik tidak lagi semata diwariskan melalui mekanisme informal berbasis sanad dan otoritas personal, tetapi juga melalui struktur pendidikan tinggi yang terorganisasi secara sistematis. Secara normatif, Ma'had Aly didefinisikan sebagai pendidikan tinggi keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh pesantren dengan tujuan utama menghasilkan ulama yang memiliki kapasitas *tafaqquh fiddîn*, yaitu penguasaan

mendalam terhadap ilmu-ilmu keislaman berbasis turats (kitab kuning).¹ Dengan demikian, Ma'had Aly merupakan bentuk institusionalisasi modern dari fungsi klasik pesantren sebagai pusat reproduksi ulama.

Secara historis, pesantren telah lama memainkan peran sentral dalam menjaga kontinuitas tradisi intelektual Islam di Indonesia. Melalui sistem pendidikan berbasis kitab kuning, pesantren berfungsi sebagai arena transmisi pengetahuan keagamaan, pembentukan otoritas ulama, serta reproduksi struktur keilmuan Islam tradisional.² Namun, berbeda dengan sistem pendidikan tinggi modern, pesantren tradisional tidak memiliki struktur akademik formal, sistem kredit semester, maupun mekanisme sertifikasi yang distandardisasi oleh negara. Legitimasi keilmuan dalam pesantren lebih bertumpu pada otoritas karismatik kyai, sanad keilmuan, serta pengakuan komunitas keagamaan.³ Dalam konteks ini, otoritas keagamaan bersifat personal dan berbasis pada pengakuan simbolik, bukan pada legitimasi birokratis atau institusional.

Kemunculan Ma'had Aly merepresentasikan transformasi fundamental dalam struktur pendidikan pesantren, khususnya dalam konteks formalisasi dan institusionalisasi pendidikan tinggi berbasis pesantren. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Ma'had Aly merupakan respons terhadap kebutuhan untuk menjembatani tradisi intelektual pesantren dengan tuntutan sistem pendidikan modern, tanpa harus kehilangan karakter epistemologisnya yang berbasis turats.⁴ Studi lain juga menegaskan bahwa Ma'had Aly berfungsi sebagai mekanisme integrasi antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan tinggi nasional, sekaligus memperkuat posisi pesantren dalam

¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma'had Aly. (2015), 3.

² Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Dinamika Studi Hadis Di PP Hasyim Asy ' Ari Tebuireng Jombang: Dari Klasikal Hingga Ma ' Had ' Aly*, 3 (2019): 223–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/alquds.v3i2.1001>.

³ Hatim Gazali and Abd Malik, *Pesantren and the Freedom of Thinking : Study of Ma ' Had Aly Pesantren Situbondo, Sukorejo Java, East*, 47 (2009): 298–300, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.2009.472.295-316>.

⁴ Zulfan Fahmi, *Konsep Dan Proses Pengembangan Kurikulum Ma ' Had Aly Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga Bireuen Aceh*, 8, no. 1 (2022): 52–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jiat.v8i1.131>.

lanskap pendidikan Islam kontemporer.⁵ Dengan demikian, Ma'had Aly tidak hanya merepresentasikan inovasi pedagogis, tetapi juga transformasi struktural dalam hubungan antara pesantren, negara, dan sistem pendidikan nasional.

Transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari intervensi negara dalam proses institusionalisasi pesantren. Pengakuan formal negara terhadap Ma'had Aly melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, memberikan legitimasi legal terhadap keberadaan pendidikan tinggi berbasis pesantren.⁶ Regulasi tersebut tidak hanya mengakui Ma'had Aly sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi juga memberikan landasan hukum bagi pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara mandiri. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, proses ini mencerminkan transformasi dari model pendidikan berbasis otoritas karismatik menuju model pendidikan berbasis otoritas legal-rasional, sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber.⁷

Secara empiris, pertumbuhan Ma'had Aly menunjukkan tren nasional yang signifikan. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa jumlah Ma'had Aly meningkat secara substansial sejak pertengahan dekade 2010-an, mencerminkan meningkatnya partisipasi pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi formal.⁸ Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pesantren tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan tradisional yang bersifat lokal dan informal, tetapi telah berkembang menjadi institusi pendidikan tinggi yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan Ma'had Aly berkaitan erat dengan upaya pesantren untuk memperkuat posisi kelembagaannya,

⁵ muhibuddin muhib hanafiah, *Modernisasi Kurikulum Pendidikan Dayah Pada Ma'had Aly*, 13, no. 3 (2023): 294, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jm.v13i3.19234>.

⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly, Bab II Pendirian Dan Penyelenggaraan (2020), 5.

⁷ Max Weber, *Economy and Society* (University of California Press, 1978), 1:215–20.

⁸ Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, “Statistik Pendidikan Islam,” preprint, n.d., 12–14.

meningkatkan legitimasi akademik, serta memperluas peran sosialnya dalam masyarakat Muslim kontemporer.⁹

Dalam perspektif teoritis, fenomena ini dapat dianalisis melalui kerangka Pierre Bourdieu tentang modal simbolik. Menurut Bourdieu, institusi pendidikan berfungsi sebagai arena reproduksi modal simbolik, di mana legitimasi intelektual dan otoritas sosial direproduksi melalui mekanisme institusional.¹⁰ Dalam konteks ini, pendirian Ma'had Aly dapat dipahami sebagai strategi pesantren untuk mengakumulasi dan mereproduksi modal simbolik dalam medan sosial keagamaan. Dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi, pesantren tidak hanya memperkuat fungsi kaderisasi ulama, tetapi juga meningkatkan posisi simboliknya dalam hierarki otoritas keagamaan nasional.

Lebih jauh, sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa Ma'had Aly memainkan peran strategis dalam reproduksi ulama dan transformasi otoritas keagamaan di Indonesia. Melalui kurikulum berbasis kitab kuning yang terstruktur secara akademik, Ma'had Aly menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki otoritas keilmuan tradisional, tetapi juga legitimasi akademik formal. Hal ini menunjukkan bahwa Ma'had Aly berfungsi sebagai jembatan antara tradisi intelektual Islam klasik dan sistem pendidikan modern, sekaligus sebagai mekanisme reproduksi otoritas keagamaan dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

Dengan demikian, Ma'had Aly merupakan fenomena multidimensional yang mencerminkan transformasi mendasar dalam struktur pendidikan Islam di Indonesia. Ia tidak hanya merepresentasikan institusionalisasi pendidikan pesantren, tetapi juga transformasi dalam mekanisme reproduksi ulama, struktur otoritas keagamaan, serta dinamika modal simbolik dalam medan sosial keagamaan. Dalam konteks ini, Ma'had Aly dapat dipahami sebagai arena di mana tradisi, otoritas, dan legitimasi dinegosiasikan kembali dalam kerangka institusi pendidikan tinggi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kepustakaan *library research* karena objeknya berupa fenomena

⁹ Nurul Husna, *Pengembangan Kurikulum Ma ' Had Aly*, 4 (2024): 3080–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.8364>.

¹⁰ Pierre Bourdieu, "The Forms of Capital," in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (Greenwood, 1986), 241–58.

institusional dan wacana keagamaan, bukan perilaku individual yang memerlukan observasi lapangan.¹¹ Pendekatan ini dipilih untuk memahami kemunculan dan perkembangan Ma'had Aly sebagai fenomena nasional dalam konteks transformasi pendidikan Islam, kaderisasi ulama, perubahan struktur otoritas, serta politik prestise pesantren.¹²

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi negara terkait penyelenggaraan Ma'had Aly, yaitu PMA Nomor 71 Tahun 2015, PMA Nomor 32 Tahun 2020, UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta data statistik Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI.¹³ Data sekunder berasal dari artikel jurnal, buku ilmiah, penelitian terdahulu, dan karya teoretik relevan dengan studi pesantren dan sosiologi agama.¹⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi berupa penelusuran, seleksi, klasifikasi, dan inventarisasi sumber tertulis. Dalam studi pustaka, dokumentasi menjadi instrumen utama untuk memperoleh data konseptual dan empiris dari teks, regulasi, dan laporan kelembagaan. Dokumen diperlakukan sebagai representasi wacana sosial-politik yang membentuk konstruksi institusional Ma'had Aly.¹⁵

Analisis data menggunakan *qualitative content analysis* melalui pembacaan sistematis terhadap dokumen untuk mengidentifikasi tema, pola argumentasi, dan struktur makna terkait pertumbuhan Ma'had Aly, kaderisasi ulama, transformasi otoritas, dan kontestasi simbolik antar-pesantren.¹⁶

Secara teoretik, penelitian menggunakan sosiologi pengetahuan dengan sintesis tiga kerangka: 1) teori otoritas Max Weber untuk menjelaskan pergeseran legitimasi dari karismatik kyai ke legal-rasional

¹¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2014), 5.

¹² Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma'had Aly.; Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly, Bab II Pendirian Dan Penyelenggaraan.

¹³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage, 2014), 183–85.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2020), 124.

¹⁵ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Sage, 2013), 24–39.

¹⁶ Max Weber, *Economy and Society*, 1:215.

melalui institusionalisasi¹⁷; 2) teori modal simbolik Pierre Bourdieu untuk menganalisis Ma'had Aly sebagai arena produksi legitimasi, prestise, dan reproduksi posisi dominan¹⁸; perspektif Talal Asad tentang tradisi diskursif untuk membaca pembentukan ortodoksi melalui relasi tradisi dan negara modern.¹⁹

Analisis dilakukan melalui tiga tahap: kondensasi data untuk memfokuskan informasi relevan, kategorisasi tematik berdasarkan dimensi pertumbuhan, kebijakan, kaderisasi, sebaran, dan politik prestise, serta interpretasi teoretik melalui kerangka Weber, Bourdieu, dan Asad untuk menghasilkan eksplanasi struktural Ma'had Aly dalam Islam Indonesia kontemporer²⁰. Dengan desain ini, penelitian bertujuan membangun eksplanasi interpretatif-kritis, bukan generalisasi statistik, tentang fungsi Ma'had Aly sebagai institusi kaderisasi, arena otoritas keagamaan, dan instrumen akumulasi modal simbolik²¹.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ma'had Aly sebagai Fenomena Nasional: Statistik, Sebaran, dan Implikasi

Secara historis, gagasan konkret tentang pendirian Ma'had Aly pertama kali dikemukakan oleh KH. As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo. Pada 26 Desember 1988, beliau mengadakan pertemuan dengan para pengasuh pesantren di wilayah Jawa Timur untuk membahas perlunya lembaga khusus kaderisasi ulama berbasis pesantren. Kekhawatiran utama yang mendorong inisiatif ini adalah wafatnya sejumlah ulama besar, seperti KH. Bisri Syansuri dan KH. Mahrus Ali, tanpa diikuti regenerasi ulama yang memadai. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk

¹⁷ Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (Harvard University Press, 1991), 163.

¹⁸ Talal Asad, *The Idea of an Anthropology of Islam* (Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1986), 14.

¹⁹ Matthew B. Miles A. Michael Huberman Johny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (Sage, 2014), 31–33.

²⁰ Matthew Miles et al., “Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook,” in *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (CA: SageCA: Sage, 2014), 12–14.

²¹ Creswell, John W, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (CA: Sage, 2014), 8–9.

mendirikan lembaga kaderisasi ulama tingkat tinggi yang berbasis pesantren.²²

Inisiatif ini kemudian direalisasikan pada awal 1990-an dengan pendirian Ma'had Aly di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, yang secara khusus dirancang untuk mencetak ulama ahli fiqh dan ushul fiqh. Secara konseptual, lembaga ini merupakan inovasi institusional dalam tradisi pendidikan pesantren, yang menggabungkan sistem pengajaran kitab kuning tradisional dengan struktur pendidikan tinggi yang lebih sistematis.²³

Penelitian Pujiono Abd. Hamid menunjukkan bahwa genealogi Ma'had Aly Sukorejo berakar pada tradisi intelektual fiqh Sunni yang kuat, dengan tujuan menghasilkan ulama yang mampu melakukan ijtihad secara kontekstual dalam menghadapi tantangan modern. Ma'had Aly dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan tradisi intelektual Islam progresif berbasis pesantren.²⁴

Sejak pengakuan formal pertama yang dilakukan pemerintah pada pertengahan 2010-an, Ma'had Aly berkembang dari fenomena yang relatif kecil menjadi komponen penting dalam arsitektur pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Pemerintah pusat mulai memberikan izin dan nomor statistik kepada Ma'had Aly secara bertahap; catatan resmi menunjukkan penerbitan izin massal tahun 2016 dan 2017, dan gelombang pendirian berikutnya terus menambah jumlah lembaga hingga awal 2025.

Secara ringkas, angka-angka kunci yang dapat direkonsiliasi dari dokumen dan rilis resmi adalah sebagai berikut:

²² M. A. Had and A. L. Y. S. Governance, "The Role of Communication in the Implementation of Ma'had Aly's Governance Policy," *International Conference on Teaching and Learning* 2, no. 1 (2024): 18–39.

²³ Intan N. N. Puspitasari et al., *Cultural Barriers and Challenges of Ma' Had Aly: The Path towards a Competitive Islamic Higher Education Institution*, 8, no. 2 (2025): 464–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/nzh.v8i2.216>.

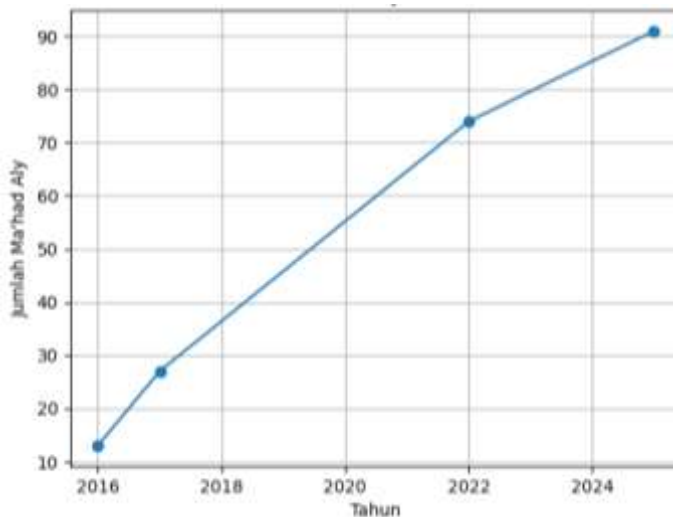
²⁴ Pujiono Abd. Hamid, "Geneologi Paradigma Fikih Progresif Di Pesantren (Studi Atas Cikal-Bakal Berdirinya Ma'had Aly Al-Qism al-Fiqh Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)," *Fenomena: Journal of the Social Sciences* 13, no. 2 (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/fenomena.v13i2.563>.

Tabel 1.
Pemberian Izin Pendirian Ma'had Aly

No	Tahun	Peristiwa Kuantitas Penting
1	2016	SK izin untuk 13 Ma'had Aly pertama dikeluarkan oleh Dirjen Pendis/Kemenag.
2	2017	Tambahan 14 izin diterbitkan (total 27 Ma'had Aly pada 2017).
3	2022	Basis data Kemenag (Agustus 2022) tercatat 74 Ma'had Aly terdaftar (sebaran: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh menonjol).
4	2025	Per 26 Maret 2025 Kemenag melaporkan tambahan izin sehingga total 91 Ma'had Aly terdaftar.

Sumber : dirangkum dari pengumuman Kementerian Agama dan peliputan media yang merujuk SK-SK Dirjen Pendis; sumber resmi Kemenag menyajikan daftar dan SK terkait untuk tahun-tahun pendirian tersebut

Diagram 1.
Trend Pertumbuhan Ma'had Aly di Indonesia (2016-2025)



Sumber : dirangkum dari pengumuman Kementerian Agama dan peliputan media yang merujuk SK-SK Dirjen Pendis; sumber resmi Kemenag menyajikan daftar dan SK terkait untuk tahun-tahun pendirian tersebut

Berdasarkan dokumen kebijakan dan studi lapangan, beberapa pendorong utama pertumbuhan Ma'had Aly dapat diringkas sebagai berikut:

1. Kebijakan afirmatif negara. Penerbitan *Peraturan Menteri Agama* (PMA No.71/2015) dan tindak lanjut regulasi (PMA No.32/2020), serta pengakuan pesantren dalam UU No.18/2019, memberi payung hukum dan prosedural bagi pesantren untuk mengajukan izin Ma'had Aly. Regulasi ini secara eksplisit mendorong harmonisasi tradisi pesantren (kitab kuning) dengan standar formal pendidikan tinggi.²⁵
2. Kebutuhan internal pesantren akan legitimasi formal. Banyak pesantren melihat Ma'had Aly sebagai cara memperoleh pengakuan akademik bagi lulusan mereka (status setara S1 dalam ranah pesantren) dan akses terhadap sumber daya negara (beasiswa, program penguatan). Studi kurikulum Ma'had Aly menggarisbawahi bahwa pesantren menggagas Ma'had Aly untuk “membangkai” tradisi kitab kuning dalam mekanisme pengakuan formal.
3. Kebutuhan pasar tenaga kerja dan birokrasi agama. Lulusan Ma'had Aly diposisikan lebih mudah dalam seleksi CPNS, pekerjaan pendidikan formal, dan peran administratif di lembaga keagamaan; beberapa pengumuman Kemenag menyoroti hal ini.²⁶

Walaupun regulasi memberikan payung hukum, beberapa tantangan implementatif muncul dari studi-studi kasus dan laporan lapangan, di antaranya seperti ketidakmampuan kapasitas SDM, yang mana tidak semua pesantren memiliki dosen berkualifikasi S2/S3 atau fasilitas penelitian yang dibutuhkan standar perguruan tinggi; ini mempengaruhi mutu akademik Ma'had Aly di beberapa lokasi. Studi perencanaan strategis Ma'had Aly menunjukkan banyak pesantren harus menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk memenuhi persyaratan PMA. Di samping itu, Menyatukan metode pengajaran kitab kuning tradisional (sorogan, bandongan) dengan tuntutan SKS/tesis formal memunculkan ketegangan kurikuler. Beberapa Ma'had Aly berhasil mengadaptasi (menggabungkan evaluasi risalah, ujian kitab, dan tugas ilmiah), namun adaptasi ini masih bersifat heterogen antar-institusi. Demikian juga dengan masalah terkait pendirian Ma'had Aly yang cenderung menuntut

²⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma'had Aly.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Puluhan Alumni Ma'had Aly Lolos Seleksi CPNS Kemenag 2024* (Jakarta, n.d.).

investasi infrastruktur (perpustakaan kitab, ruang kelas, laboratorium bahasa), yang menjadi beban berat bagi pesantren yang mengandalkan sumbangan publik. Kebijakan subsidi atau fasilitasi dari pemerintah masih diperlukan agar kualitas tidak hanya terpusat pada pesantren kaya.

Dari perspektif teori sosial, pola pertumbuhan ini mengilustrasikan dua proses sekaligus: (1) institusionalisasi, pesantren merekonstruksi diri untuk mendapatkan legitimasi legal-rasional di bawah payung negara (Weberian reading), dan (2) akumulasi modal simbolik, Ma'had Aly menjadi kendaraan untuk mengakumulasi prestise, reputasi, dan legitimasi keilmuan (Bourdieuian reading). Keduanya menjelaskan mengapa pesantren berskala besar dan jaringan pesantren lebih cepat memobilisasi sumber daya untuk mendirikan Ma'had Aly, sementara pesantren kecil seringkali masih berjuang memenuhi syarat formal.

Sebaran Geografis dan Pola Konsentrasi

Data sebaran menunjukkan konsentrasi Ma'had Aly pada provinsi-provinsi dengan tradisi pesantren kuat, terutama di Pulau Jawa (Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak), diikuti Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Aceh di luar Pulau Jawa.²⁷ Ini memunculkan dua pola penting:

1. Konsentrasi historis, daerah yang tradisi pesantrennya sudah mapan (Jawa Timur, misalnya) cenderung pertama kali mengajukan dan mendapatkan izin Ma'had Aly, sehingga akumulasi institusi di wilayah tersebut cepat meningkat.
2. Penetrasi bertahap ke luar Jawa, meski lambat, pada periode 2019–2024 tampak kenaikan jumlah Ma'had Aly di luar Jawa (Sumatera, Sulawesi, Kalimantan), yang mencerminkan upaya penyebaran model pendidikan tinggi pesantren secara nasional.

Konsentrasi ini penting secara normatif: ia menandakan bahwa posisi simbolik pesantren modal sosial yang terbangun lewat jaringan alumni, dana, dan legitimasi kiai mempermudah pesantren besar di pusat jaringan untuk memenuhi persyaratan regulasi (SDM, infrastruktur, kurikulum) dibanding pesantren skala kecil di daerah pinggiran.

Dominasi persebaran Ma'had Aly di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, berkaitan erat dengan struktur historis pesantren sebagai pusat reproduksi otoritas keagamaan di Indonesia. Secara historis, Jawa Timur merupakan wilayah dengan konsentrasi pesantren terbesar dan memiliki

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Enam Ma'had Aly Terima IJOP, Total 91 Lembaga Sudah Kantongi Izin* (Jakarta 26 Maret 2025, 2025).

peran sentral dalam transmisi tradisi intelektual Islam berbasis kitab kuning sejak abad ke-18. Penelitian klasik Zamakhsyari Dhofier menunjukkan bahwa pesantren di Jawa Timur tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat reproduksi ulama yang memiliki pengaruh nasional melalui jaringan genealogis keilmuan (*sanad*) yang kuat.²⁸ Struktur ini menciptakan fondasi institusional yang memungkinkan pesantren di wilayah tersebut mengembangkan pendidikan tingkat lanjut seperti Ma'had Aly.

Selain faktor historis, kemunculan Ma'had Aly juga mengikuti pola genealogis jaringan ulama pesantren. Ma'had Aly pertama kali dipelopori oleh KH. As'ad Syamsul Arifin di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Jawa Timur, pada akhir 1980-an sebagai respons terhadap kekhawatiran akan melemahnya kaderisasi ulama tradisional.²⁹ Model ini kemudian direplikasi oleh pesantren lain yang berada dalam jaringan intelektual dan ideologis yang sama, terutama di lingkungan pesantren tradisional Nahdlatul Ulama. Penelitian Firmanda Taufiq menunjukkan bahwa perkembangan Ma'had Aly sangat dipengaruhi oleh jaringan pesantren tradisional yang memiliki komitmen kuat terhadap transmisi tradisi keilmuan Islam klasik.³⁰

Dominasi Jawa Timur juga berkaitan dengan kuatnya basis sosial Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam tradisional terbesar di Indonesia. Pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan tradisi keilmuan NU memiliki orientasi kuat pada kaderisasi ulama berbasis kitab kuning, sehingga memiliki kebutuhan struktural untuk mengembangkan pendidikan tingkat tinggi seperti Ma'had Aly.³¹ Dalam konteks ini, Ma'had Aly berfungsi sebagai mekanisme institusional untuk memastikan keberlanjutan reproduksi otoritas keagamaan pesantren.

²⁸ Zamakhsyari Dhofier, *The Tradition of the Pesantren: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java* (Arizona State University, 1999), 34–56.

²⁹ Hamid, "Geneologi Paradigma Fikih Progresif Di Pesantren (Studi Atas Cikal-Bakal Berdirinya Ma'had Aly Al-Qism al-Fiqh Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)," 187–205.

³⁰ Firmanda Taufiq, "From Traditionality to Modernity: How the Ma'had Aly Contributes to Muslim Society in Indonesia," *Muslim Education Review* 3, no. 2 (2024): 145, <https://doi.org/https://doi.org/10.56529/mer.v3i2.320>.

³¹ Azyumardi Azra, "Pesantren and the Reproduction of Islamic Authority," *Studia Islamika* 4, no. 1 (1997): 20, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sdi.v4i1.784>.

Selain faktor genealogis dan organisasi, dominasi Jawa Timur juga dapat dijelaskan melalui perspektif sosiologi pendidikan Pierre Bourdieu, khususnya konsep modal simbolik. Dalam perspektif ini, institusi pendidikan berfungsi sebagai mekanisme reproduksi legitimasi sosial dan simbolik. Pesantren-pesantren besar di Jawa Timur memiliki kepentingan untuk mempertahankan posisi mereka sebagai pusat otoritas keagamaan nasional, dan pendirian Ma'had Aly menjadi salah satu instrumen penting dalam reproduksi modal simbolik tersebut.³² Dengan memperoleh pengakuan formal dari negara, pesantren tidak hanya memperkuat fungsi kaderisasi ulama, tetapi juga meningkatkan legitimasi simbolik mereka dalam medan sosial keagamaan.

Faktor lain yang turut menjelaskan dominasi Jawa Timur adalah kapasitas institusional pesantren yang lebih matang dibandingkan wilayah lain. Pesantren-pesantren besar di Jawa Timur telah memiliki sistem pendidikan diniyah berjenjang, tenaga pengajar ulama yang kompeten, serta tradisi intelektual yang kuat, yang menjadi prasyarat utama pendirian Ma'had Aly.³³ Selain itu, wilayah ini juga memiliki ekosistem intelektual pesantren yang paling berkembang di Indonesia, termasuk tradisi *bahtsul masail*, penulisan karya ilmiah keislaman, dan jaringan ulama yang luas.³⁴

Dengan demikian, konsentrasi Ma'had Aly di Jawa Timur mencerminkan struktur historis distribusi otoritas keagamaan di Indonesia. Persebaran ini mengikuti pola distribusi historis pesantren sebagai pusat produksi ulama, serta mencerminkan dinamika reproduksi modal simbolik dan institusional dalam sistem pendidikan Islam Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan Ma'had Aly tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendidikan semata, tetapi juga oleh struktur kekuasaan, legitimasi simbolik, dan sejarah intelektual pesantren.

³² Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, 170.

³³ Muhibuddin, "Modernisasi Kurikulum Pendidikan Dayah Dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Mudarrisuna* 13, no. 3 (2023): 412, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jm.v13i3.19234>.

³⁴ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning and the Ulama in Indonesia*, no. 2 (Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1990), 146:226–269, <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/22134379-90003218>.

Geneologi Ma'had Aly dalam Perspektif Historis-Epistemologis

Pendekatan genealogi terhadap *Ma'had Aly* berangkat dari asumsi bahwa lembaga pendidikan tidak lahir secara ahistoris, melainkan merupakan hasil sedimentasi praktik sosial, relasi kuasa, dan transformasi epistemik yang berlangsung panjang. Dalam konteks ini, *Ma'had Aly* bukan sekadar inovasi kelembagaan, tetapi artikulasi modern dari tradisi pesantren yang telah mengalami proses diferensiasi internal sejak abad ke-18.

Secara historis, pesantren beroperasi dalam model transmisi keilmuan berbasis *halaqah*, *sanad*, dan pendalaman kitab turāth. Pola ini melahirkan diferensiasi keahlian informal santri yang menekuni fikih, hadis, atau tasawuf secara mendalam di bawah otoritas kiai tertentu.³⁵ Diferensiasi ini menjadi cikal bakal konsepsi *takhassus* yang kemudian dilembagakan dalam *Ma'had Aly*.

Transformasi menuju bentuk formal mulai terlihat ketika pesantren menghadapi modernisasi pendidikan Islam pada abad ke-20. Azyumardi Azra menunjukkan bahwa jaringan ulama Nusantara yang belajar di Haramain dan Al-Azhar telah membawa model diferensiasi keilmuan yang lebih sistematis ke Indonesia.³⁶ Model ini memperkuat kecenderungan spesialisasi disiplin ilmu dalam tradisi pesantren.

Dalam perkembangan kontemporer, *Ma'had Aly* muncul sebagai respons terhadap kebutuhan institusionalisasi pendidikan tinggi berbasis pesantren. Penelitian Riswadi dan Amrullah menunjukkan bahwa inovasi akademik di *Ma'had Aly* tidak menggantikan tradisi lama, melainkan merekonstruksinya dalam kerangka kurikulum formal yang terstruktur.³⁷ Dengan demikian, secara geneologis, *Ma'had Aly* merupakan titik temu antara kontinuitas tradisi dan intervensi regulasi modern.

Pembentukan *takhassus* juga dipengaruhi oleh karakteristik geneologi keilmuan suatu pesantren yang ditandai oleh kecenderungan para tokoh sentral atau pendiri pondok pesantren terkait. Kepakaran seorang Kiai pada suatu bidang tertentu mempengaruhi corak serta

³⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (LP3ES, 2011), 44.

³⁶ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII* (Kencana, 2013), 109.

³⁷ Riswadi and Zen Amrullah, "Transformation of Pesantren Academic Traditions: A Study of *Ma'had Aly* Learning Innovations," *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 6, no. 1 (2023): 55, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/sajie.v6i1.7521>.

metode pembelajaran suatu pondok, hingga lahirnya Mahad Aly sebagai puncak transformasi pendidikan tradisional Islam turut melegitimasi kepakaran para pendiri pondok sebagai yang erat dengan potret kepakaran pada bidang keislaman tertentu, demikian juga sebagai bentuk komitmen pondok pesantren dalam melestarikannya.

Hal tersebut bisa dilihat dari *takhassus* Mahad Aly yang merupakan cerminan bidang kepakaran para pendiri pondok pesantren, seperti halnya Mahad Aly Amtsilati di Jepara dengan *takhassus* Ilmu Bahasa dan Sastra Arab yang merupakan kepakaran Kiai Taufiqul Hakim, selaku tokoh sentral Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati, Ma'had Aly Situbondo dengan *takhassus* fikih yang didirikan oleh KHR. As'ad Syamsul Arifin yang terkenal seorang fakih, serta Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang yang memiliki *takhassus* pada bidang Hadis, mengingat Syekh Hasyim Asy'ari merupakan sosok ulama yang menekuni bidang Hadis.

Genealogi ini juga memperlihatkan adanya dialektika antara otoritas karismatik kiai dan rasionalisasi akademik. Dalam pesantren klasik, legitimasi keilmuan berbasis sanad personal; sementara dalam Ma'had Aly, legitimasi tersebut diperkuat melalui sistem akreditasi dan standar nasional pendidikan tinggi. Namun demikian, penelitian Firmanda Taufiq menunjukkan bahwa meskipun mengikuti standar formal, Ma'had Aly tetap mempertahankan turath sebagai sumber utama epistemologi.³⁸

Dalam perspektif teori genealogi, hal ini dapat dipahami sebagai proses *continuity and rupture* ada kesinambungan substansi, tetapi terjadi perubahan bentuk kelembagaan. Ma'had Aly tidak menegasikan pesantren klasik; ia justru mengkodifikasikan tradisi tersebut dalam bentuk pendidikan tinggi yang diakui negara. Bahkan, pengakuan melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren semakin memperkuat posisi Ma'had Aly sebagai representasi resmi otoritas keilmuan pesantren dalam struktur pendidikan nasional.

Politik Prestise dan Genealogi Diferensiasi Ma'had Aly dalam Medan Sosial Pesantren

Fenomena pendirian dan perkembangan Ma'had Aly tidak dapat dipahami semata sebagai ekspansi kelembagaan pendidikan tinggi

³⁸ Taufiq, "From Traditionality to Modernity: How the Ma'had Aly Contributes to Muslim Society in Indonesia," 133.

berbasis pesantren. Ia merupakan bagian dari dinamika diferensiasi internal dalam medan sosial pesantren yang semakin kompleks. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, pesantren dapat dipahami sebagai suatu field atau medan sosial yang relatif otonom, di dalamnya berlangsung pertarungan untuk memperebutkan berbagai bentuk modal, terutama modal simbolik berupa legitimasi, reputasi, dan otoritas moral intelektual.³⁹ Medan ini tidak statis, melainkan terus bergerak seiring perubahan konfigurasi kekuasaan dan regulasi negara.

Secara historis, pesantren memperoleh legitimasi terutama dari modal simbolik yang bersumber pada karisma kiai, kesinambungan sanad keilmuan, dan penguasaan turats.⁴⁰ Legitimasi tersebut bersifat kultural dan komunitarian, tidak selalu membutuhkan pengakuan formal negara. Namun, ketika negara mulai mengintegrasikan pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional melalui kebijakan regulatif, termasuk pengakuan Ma'had Aly sebagai pendidikan tinggi keagamaan yang sah, terjadi proses konversi modal. Modal kultural dan religius yang sebelumnya bersifat internal komunitas pesantren mulai dikonversi menjadi modal simbolik yang dilegalisasi negara melalui mekanisme izin operasional, asesmen mutu, dan akreditasi formal.⁴¹

Dalam kerangka Bourdieusian, konversi ini menunjukkan bahwa pesantren sedang bernegosiasi untuk mempertahankan posisinya dalam medan kekuasaan yang lebih luas. Modal simbolik yang dilegitimasi negara tidak hanya meningkatkan status pesantren di hadapan publik, tetapi juga memperluas aksesnya terhadap sumber daya birokratis dan politik. Bourdieu menegaskan bahwa modal simbolik bekerja efektif ketika ia diakui sebagai sah oleh struktur dominan.⁴² Dalam konteks Ma'had Aly, pengakuan negara melalui Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan regulasi turunannya menjadi bentuk pengesahan simbolik tersebut.

Pertumbuhan jumlah Ma'had Aly dalam satu dekade terakhir menunjukkan terjadinya diferensiasi institusional yang signifikan di antara pesantren. Status memiliki Ma'had Aly tidak lagi sekadar

³⁹ Pierre Bourdieu, *The Field of Cultural Production* (Columbia University Press, 1993), 29.

⁴⁰ Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, 56.

⁴¹ Riswadi and Amrullah, "Transformation of Pesantren Academic Traditions: A Study of Ma'had Aly Learning Innovations," 60.

⁴² Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, 166–70.

tambahan program pendidikan, tetapi menjadi penanda stratifikasi baru. Pesantren yang mampu memenuhi persyaratan administratif, akademik, dan sumber daya manusia memperoleh posisi lebih tinggi dalam hierarki simbolik. Sebaliknya, pesantren yang tidak memiliki kapasitas tersebut berpotensi tertinggal dalam struktur baru ini. Fenomena ini sejalan dengan temuan Mujamil Qomar yang menyatakan bahwa modernisasi pendidikan pesantren selalu menghasilkan bentuk baru diferensiasi internal.⁴³

Struktur hierarki semakin diperkuat melalui sistem asesmen mutu dan kategorisasi seperti Mumtaz, Jayyid, dan Maqbul. Klasifikasi tersebut bukan hanya instrumen administratif, melainkan mekanisme simbolik yang mengonstruksi persepsi kualitas. Dalam perspektif Bourdieu, kategorisasi resmi semacam ini berfungsi sebagai mekanisme konsekrasi yang menetapkan siapa yang memiliki otoritas sah dalam medan tertentu.⁴⁴ Predikat tertinggi menjadi sumber akumulasi modal simbolik yang kemudian dapat dikonversi menjadi modal sosial melalui jejaring kerja sama, modal ekonomi melalui peningkatan minat calon santri, dan bahkan modal politik melalui akses yang lebih luas terhadap birokrasi keagamaan.

Dimensi politik prestise juga tercermin dalam pilihan program takhasus. Dominasi takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh di banyak Ma'had Aly bukan sekadar persoalan preferensi akademik, melainkan refleksi dari struktur otoritas keagamaan dalam Islam Indonesia. Sejak lama, penguasaan fiqh diasosiasikan dengan otoritas normatif dalam menentukan hukum dan fatwa.⁴⁵ Dengan membuka takhasus fiqh, pesantren tidak hanya mendidik mahasiswa, tetapi juga mereproduksi klaim otoritas dalam mendefinisikan ortodoksi. Dalam kerangka Bourdieu, ini adalah upaya mempertahankan posisi dominan dalam produksi definisi sah tentang agama.

Fenomena keberhasilan alumni Ma'had Aly dalam seleksi aparatur sipil negara juga dapat dibaca sebagai bentuk konversi modal simbolik ke dalam modal birokratis. Ketika lulusan Ma'had Aly diterima dalam struktur resmi negara, terjadi transformasi otoritas karismatik berbasis sanad menjadi otoritas legal rasional sebagaimana dikemukakan oleh

⁴³ Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Erlangga, 2002), 210.

⁴⁴ Pierre Bourdieu, *Practical Reason* (Stanford University Press, 1998), 47–52.

⁴⁵ Bruinessen, *Kitab Kuning and the Ulama in Indonesia*, 146:226–69.

Max Weber.⁴⁶ Legitimasi tidak lagi semata berasal dari pengakuan komunitas religius, tetapi dari sertifikasi formal yang diakui negara. Pesantren yang alumninya terserap dalam birokrasi memperoleh penguatan reputasi karena jaringan alumni tersebut memperluas pengaruh kelembagaan.

Namun, politik prestise ini tidak bebas dari ketimpangan. Pesantren besar yang memiliki sumber daya manusia doktoral, infrastruktur memadai, dan jaringan luas lebih mudah memenuhi standar formal. Sebaliknya, pesantren kecil di wilayah perifer menghadapi hambatan struktural. Situasi ini berpotensi mereproduksi apa yang oleh Bourdieu disebut sebagai reproduksi sosial, yakni kecenderungan sistem untuk memperkuat posisi yang sudah dominan.⁴⁷ Dengan demikian, institusionalisasi Ma'had Aly dapat memperdalam stratifikasi internal pesantren.

Selain itu, terdapat ketegangan epistemologis antara tradisi dan birokratisasi. Sebagian kalangan pesantren memandang bahwa formalisasi yang terlalu administratif berisiko menggeser karakter khas pesantren seperti sorogan, bandongan, dan relasi personal kiai santri. Ketegangan ini menunjukkan bahwa medan pesantren bukan hanya arena kompetisi eksternal, tetapi juga ruang perdebatan internal mengenai arah transformasi.

Secara keseluruhan, Ma'had Aly telah menjadi arena simbolik tempat berlangsungnya negosiasi antara tradisi, negara, dan logika pasar pendidikan. Politik prestise yang menyertainya menandakan bahwa pendidikan tinggi pesantren bukan sekadar proyek teknokratis, melainkan bagian dari perjuangan mendefinisikan otoritas keagamaan dalam Islam Indonesia kontemporer. Pesantren yang berhasil mengintegrasikan turats dengan legalitas formal memperluas hegemoninya dalam medan sosial keagamaan. Sebaliknya, pesantren yang gagal beradaptasi menghadapi risiko marginalisasi dalam struktur hierarki baru yang semakin menguat.

KESIMPULAN

Ma'had Aly dalam Indonesia kontemporer bukan sekadar lembaga pendidikan tinggi pesantren, melainkan fenomena nasional yang

⁴⁶ Max Weber, *Economy and Society*, 1:215.

⁴⁷ Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron, *Reproduction in Education, Society and Culture* (Sage, 1990), 54–78.

merefleksikan transformasi struktur otoritas Islam dan relasi negara-agama. Pertumbuhannya dari 27 lembaga pada 2017 menjadi 91 lembaga pada 2025 menunjukkan Ma'had Aly sebagai artikulasi institusional proyek kaderisasi ulama yang terstandarisasi dan terkoneksi dengan sistem pendidikan nasional. Secara historis ia lahir dari kebutuhan internal pesantren memperkuat transmisi turats sekaligus merespons modernisasi. Pasca UU Pesantren 2019, Ma'had Aly memperoleh legitimasi legal-birokratis sehingga otoritas ulama bergeser dari karismatik ke rasional-legal. Sintesis Weber-Bourdieu-Asad menjelaskan: Weber, pergeseran otoritas; Bourdieu, arena reproduksi modal simbolik gelar dan pengakuan negara; Asad, pembentukan ortodoksi melalui relasi tradisi dan regulasi. Dominasi di Jawa Timur menegaskan peran faktor historis dan jaringan pesantren salafiyah.

Penelitian selanjutnya perlu dilakukan secara *mixed method* dengan studi lapangan untuk menguji praktik kurikulum dan kualitas lulusan. Negara perlu memberi afirmasi bagi pesantren kecil agar tidak termarginalkan dalam sistem akreditasi. Diversifikasi takhassus di luar fiqh perlu didorong untuk memperluas otoritas keagamaan.

Keterbatasan penelitian antara lain: 1) Data hanya sampai Maret 2025; 2) Analisis berbasis dokumen tanpa wawancara pengelola/kiai; 3) Fokus pada otoritas dan prestise, belum menguji *tracer study* lulusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asad, Talal. *The Idea of an Anthropology of Islam*. Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1986.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*. Kencana, 2013.
- _____, Azyumardi. "Pesantren and the Reproduction of Islamic Authority." *Studia Islamika* 4, no. 1 (1997). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sdi.v4i1.784>.
- Bourdieu, Pierre. *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press, 1991.
- _____. *Practical Reason*. Stanford University Press, 1998.

- _____. *The Field of Cultural Production*. Columbia University Press, 1993.
- _____. “The Forms of Capital.” In *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Greenwood, 1986.
- _____, Pierre, and Jean-Claude Passeron. *Reproduction in Education, Society and Culture*. Sage, 1990.
- Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning and the Ulama in Indonesia*. Vol. 146. no. 2. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1990. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/22134379-90003218>.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. CA: Sage, 2014.
- Dhofier, Zamakhsyari. *The Tradition of the Pesantren: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java*. Arizona State University, 1999.
- _____. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. LP3ES, 2011.
- Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. “Statistik Pendidikan Islam.” Preprint, n.d.
- Fahmi, Zulfan. *Konsep Dan Proses Pengembangan Kurikulum Ma ' Had Aly Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga Bireuen Aceh*. 8, no. 1 (2022): 1–2. <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jiat.v8i1.131>.
- Gazali, Hatim, and Abd Malik. *Pesantren and the Freedom of Thinking: Study of Ma ' Had Aly Pesantren Situbondo, Sukorejo Java, East*. 47 (2009). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.2009.472.295-316>.
- Had, M. A., and A. L. Y. S. Governance. “The Role of Communication in the Implementation of Ma'had Aly's Governance Policy.” *International Conference on Teaching and Learning* 2, no. 1 (2024): 18–39.
- Hamid, Pujiono Abd. “Geneologi Paradigma Fikih Progresif Di Pesantren (Studi Atas Cikal-Bakal Berdirinya Ma'had Aly Al-Qism al-Fiqh Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo).” *Fenomena: Journal of the Social Sciences*

- 13, no. 2 (2014).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35719/fenomena.v13i2.563>.
- Husna, Nurul. *Pengembangan Kurikulum Ma ' Had Aly*. 4 (2024): 3080–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.8364>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Puluhan Alumni Ma'had Aly Lolos Seleksi CPNS Kemenag 2024*. Jakarta, n.d.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Enam Ma'had Aly Terima IJOP, Total 91 Lembaga Sudah Kantongi Izin*. Jakarta 26 Maret 2025, 2025.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage, 2013.
- Max Weber. *Economy and Society*. Vol. 1. University of California Press, 1978.
- Miles, Matthew, Michael Huberman, and Johnny Saldaña. “Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.” In *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. CA: SageCA: Sage, 2014.
- Muhibuddin. “Modernisasi Kurikulum Pendidikan Dayah Dalam Sistem Pendidikan Nasional.” *Mudarrisuna* 13, no. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jm.v13i3.19234>.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly, Bab II Pendirian Dan Penyelenggaraan (2020).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma'had Aly. (2015).
- Puspitasari, Intan N. N., Hilmi Husaini Zuhri, and Achmad Yani. *Cultural Barriers and Challenges of Ma ' Had Aly : The Path towards a Competitive Islamic Higher Education Institution*. 8, no. 2 (2025): 464–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/nzh.v8i2.216>.
- Qomar, Mujamil. *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Erlangga, 2002.
- Riswadi, and Zen Amrullah. “Transformation of Pesantren Academic Traditions: A Study of Ma'had Aly Learning Innovations.”

Southeast Asian Journal of Islamic Education 6, no. 1 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21093/sajie.v6i1.7521>.

Saldana, Matthew B. Miles A. Michael Huberman Johny. *Qualitative Data Analysis*. Sage, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2020.

Suryadilaga, Muhammad Alfatih. *Dinamika Studi Hadis Di PP Hasyim Asy ' Ari Tebuireng Jombang : Dari Klasikal Hingga Ma ' Had ' Aly*. 3 (2019): 119–34.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29240/alquds.v3i2.1001>.

Taufiq, Firmanda. “From Traditionality to Modernity: How the Ma'had Aly Contributes to Muslim Society in Indonesia.” *Muslim Education Review* 3, no. 2 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.56529/mer.v3i2.320>.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2014.